

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

RENJA merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi RENJA adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya RENJA sebagai dokumen awal perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan dapat tajam dan realistis.

RENJA Kecamatan Dukuhturi Tahun 2022 yang disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan, rancangan kegiatan, prioritas dan sasaran kegiatan serta rencana program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Syukur Alhamdulillah bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dukuhturi telah tersusun berkat dukungan semua pihak. Harapan atas tersusunnya RENJA Kecamatan Dukuhturi Tahun 2022 yaitu untuk memberikan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Akhirnya segala daya dan upaya tidaklah sempurna kecuali hanya milik Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun guna mewujudkan cita – cita serta visi dan misi Kantor Kecamatan Dukuhturi .

Dukuhturi, 2021
CAMAT DUKUHTURI

MUKTAROM, S.IP
Pembina.Tk.I
NIP. 19640919 198607 1 002

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Landasan Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	
3.3. Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Renja PD ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga berfungsi sebagai kerangka (*framework*) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* pembangunan.

Renja Kantor Camat Dukuhturi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dukuhturi 2019-2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan rencana kerja pada tahun 2023.

RENJA Kantor Camat Dukuhturi Tahun 2022 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang indikator kinerja dan kelompok sasarannya menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju, dimana rancangan Renja ini selanjutnya dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kantor Camat Dukuhturi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kantor Camat Dukuhturi Tahun 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman

pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan RENJA Kantor Camat Dukuhturi Tahun 2022 adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Kantor Kecamatan Dukuhturi Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SLAWI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DUKUHTURI

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN DUKUHTURI TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Dukuhturi Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Dukuhturi.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Dukuhturi, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2020 Kecamatan Dukuhturi telah melaksanakan 2 (Dua) program dan 11 (Sebelas) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Dukuhturi Tahun 2020.

Dari 2 program dan 11 kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 79,59 %. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 Kecamatan Slawi

- TERLAMPIR -

Tabel 2.2
Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021 Kecamatan Slawi

- TERLAMPIR -

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Dukuhturi Tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa terdapat kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan, karena faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung keberhasilan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Refocussing anggaran untuk mempercepat penanganan Covid 19;
 - b. Efisiensi anggaran berupa sisa dari beberapa rekening belanja.

2. Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
 - b. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal
 - c. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
 - d. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
 - e. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Slawi dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Dukuhturi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten Tegal

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja				Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	77,44	77,44	78,69	79,94	80,94	81,94	
2.	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan;	0,00	00,00	50,00	68,00	89,00	100,00	
3.	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan;	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	
4.	Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan;	0,00	5,56	5,56	5,56	11,11	16,67	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Dukuhturi Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Slawi yang tidak memenuhi target adalah:

a. Peningkatan Persentase desa mandiri

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Belum optimalnya koordinasi pamong desa dan BPD

b. Banyak perubahan dalam perencanaan kegiatan dan realisasi kegiatan

c. Terbatasnya anggaran yang ada di OPD terkait

2. IKU Kecamatan Dukuhturi yang dapat memenuhi target adalah:

a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

b. Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes.

c. Tiap desa telah menyusun RKA masing-masing kegiatan

d. Ada review RPJM sesuai dengan RKP

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Dukuhturi Tahun 2020 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan;

2. Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan APBDes

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara rutin

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Dukuhturi merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kecamatan Dukuhturi menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya SDM/jumlah	Tidak ada tambahan ASN
Monitoring ke desa masih insidentil	Kesibukan di masing-masing Kasi dengan tupoksi
Kesiapan data musrenbang harus menunggu input SIPD	Tidak semua pamong menguasai aplikasi

Selain itu, selama Tahun 2020, Kecamatan Dukuhturi juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Potensi Dukuhturi sebagai Sentra Industri Kreatif	Akses Danais belum secara maksimal
Obyek wisata di tiap desa cukup banyak	Belum semua potensi wisata di tiap desa terpublikasikan
Sentra kuliner di Kecamatan Dukuhturi cukup banyak	Publikasi masih terbatas dan perlu intervensi bagi pelaku kuliner dan bersifat individualis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Dukuhturi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal;
2. Ada monitoring yang terjadwal secara rutin;

3. Persiapan musrenbang kecamatan harus didukung data yang final dan akurat dari desa.

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada Kecamatan Dukuhturi adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan dikarenakan Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa, Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa, dan Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Dukuhturi dan mindset masyarakat sangatlah mendominasi sehingga perlu diberikan pemahaman dengan mengubah pola pikir masyarakat. Selain itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyumbangkan sebagian keuntungannya CSR yang merupakan kewajiban perusahaan swasta. Hal ini merupakan peluang bagi kecamatan agar mereka ikut berperan dalam Pronangkis.

2. Bidang Pemerintahan Desa

Pembangunan desa belum tertib administrasi, berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan Publik

Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Dukuhturi untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal dan Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Dukuhturi Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif (ribuan)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (ribuan)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan	77,44	42.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan	77,44	42.970.000	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	Persen; Tahunan	100	31.445.500	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	Persen; Tahunan	100	31.445.500	
	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Pelaksanaan Kegiatan Tilik desa (Diseminasi)</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>31.445.500</i>	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Pelaksanaan Kegiatan Tilik desa (Diseminasi)</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>31.445.500</i>	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	Persen; Tahunan	100	11.514.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	Persen; Tahunan	100	11.514.500	
	<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah desa lunas PBB</i>	<i>Desa</i>	<i>18</i>	<i>11.514.500</i>	<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah desa lunas PBB</i>	<i>Desa</i>	<i>18</i>	<i>11.514.500</i>	
		<i>Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur</i>	<i>dok</i>	<i>100</i>			<i>Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur</i>	<i>dok</i>	<i>100</i>		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	100	100	10.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	100	100	10.000.000	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanganan Trantibum	desa/kel	18	10.000.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanganan Trantibum	desa/kel	18	10.000.000	
	<i>Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah rakor mitasi bencana (Covid 19)</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>	<i>10.000.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah rakor mitasi bencana (Covid 19)</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>	<i>10.000.000</i>	
		<i>Jumlah LINMAS dibina</i>	<i>orang</i>	<i>40</i>			<i>Jumlah LINMAS dibina</i>	<i>orang</i>	<i>40</i>		

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	50	53.556.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	50	53.556.000
	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa/tertentu	desa	18	53.556.000	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa/tertentu	desa	18	53.556.000
	<i>Sub. Kegiatan Fasilitas administrasi tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Lomba Desa</i>	desa	18	21.984.000	<i>Sub. Kegiatan Fasilitas administrasi tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Lomba Desa</i>	desa	18	21.984.000
	<i>Sub. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Monev Bantuan Keuangan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</i>	desa	18	19.227.000	<i>Sub. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Monev Bantuan Keuangan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</i>	desa	18	19.227.000
	<i>Sub. Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah Desa Tefasilitasi Penyusunan RKPDes pada Musrenbangdes</i>	desa	18	12.145.000	<i>Sub. Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah Desa Tefasilitasi Penyusunan RKPDes pada Musrenbangdes</i>	desa	18	12.145.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	0	107.359.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	0	107.359.100
		Persentase desa maju Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	5,56			Persentase desa maju Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	5,56	

	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	desa	18	97.429.100	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	desa	18	107.359.100	
	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD</i>	<i>orang</i>	<i>100</i>	<i>16.992.500</i>	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD</i>	<i>orang</i>	<i>100</i>	<i>16.992.500</i>	
	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan lomba MTQ</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>	<i>80.436.600</i>	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan lomba MTQ</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>	<i>90.436.600</i>	
		<i>Jumlah Kegiatan Lomba FASI</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>			<i>Jumlah Kegiatan Lomba FASI</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>		
		<i>Jumlah Kegiatan Lomba Gamelan</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>			<i>Jumlah Kegiatan Lomba Gamelan</i>	<i>kali</i>	<i>1</i>		
		<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK</i>	<i>Kali</i>	<i>12</i>			<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK</i>	<i>Kali</i>	<i>12</i>		
		<i>Jumlah Pembinaan Karang Taruna</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>			<i>Jumlah Pembinaan Karang Taruna</i>	<i>keg</i>	<i>4</i>		

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	100	83.177.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	100	83.177.300
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen; Tahunan	100	83.177.300	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen; Tahunan	100	83.177.300

	Sub. Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tegal	keg	2	51.359.800	Sub. Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tegal	keg	2	51.359.800
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	kali	12	31.817.500	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	kali	12	31.817.500

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Persen; Tahunan	100	1.456.061.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Persen; Tahunan	100	1.656.061.600
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	dok	6	22.403.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	dok	6	22.403.500
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	<i>dok</i>	<i>3</i>	<i>6.000.000</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	<i>dok</i>	<i>3</i>	<i>6.000.000</i>

	<i>Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja</i>	<i>dok</i>	3	16.403.500	<i>Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja</i>	<i>dok</i>	3	16.403.500
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	dok	12	1.242.844.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	dok	12	1.242.844.000
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>tahun</i>	1	1.212.674.000	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>tahun</i>	1	1.212.674.000

	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan</i>	<i>bulan</i>	12	30.170.000	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan</i>	<i>bulan</i>	12	30.170.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	68.996.500	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	68.996.500
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>jumlah jenis penerangan bangunan kantor</i>	<i>jenis</i>	15	2.355.400	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>jumlah jenis penerangan bangunan kantor</i>	<i>jenis</i>	15	2.355.400
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>jenis</i>	26	10.731.700	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>jenis</i>	26	10.731.700

	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia</i>	<i>jenis</i>	15	3.914.900	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia</i>	<i>jenis</i>	15	3.914.900
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan</i>	<i>bulan</i>	12	16.291.000	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan</i>	<i>bulan</i>	12	16.291.000
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah jenis barang cetakan</i>	<i>jenis</i>	2	2.669.000	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah jenis barang cetakan</i>	<i>jenis</i>	2	2.669.000
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan</i>	<i>exemplar</i>	143	3.650.000	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan</i>	<i>exemplar</i>	143	3.650.000

	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi</i>	<i>bulan</i>	12	29.384.500	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi</i>	<i>bulan</i>	12	29.384.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			70.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			70.800.000
	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah meterai</i>	<i>buah</i>	120	1.200.000	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah meterai</i>	<i>buah</i>	120	1.200.000
	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air</i>	<i>bulan</i>	12	29.300.000	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air</i>	<i>bulan</i>	12	29.300.000

	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah tenaga jasa kantor</i>	<i>orang</i>	2	40.300.000	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah tenaga jasa kantor</i>	<i>orang</i>	2	40.300.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik			51.017.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik			251.017.600
	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara</i>	<i>unit</i>	8	38.150.000	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara</i>	<i>unit</i>	8	38.150.000

	<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya terpelihara</i>	<i>unit</i>	40	8.030.000	<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya terpelihara</i>	<i>unit</i>	40	8.030.000
	<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Pengecatan Gedung Kantor</i>	<i>unit</i>	1	4.837.600	<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Rehabilitasi Tembok Pagar Kantor Kecamatan</i>	<i>unit</i>	1	204.837.600
					1.752.924.000					1.952.924.000

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP 4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2021 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan social
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public
4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah
5. Peningkatan daya saing ekonomi local, ketahanan pangan dan pengembangan industry kreatif
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah " Penguatan Dan Transformasi Sosial - Ekonomi Dan Pemerataan Insfrastruktur Yang

Didukung SDM Pemerintahan Yang Profesional” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK;
2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi;
4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru;
5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender;
6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin;
7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2022-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
I	MISI I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat								
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	63,69	64,69	65,19	65,69	65,69
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	78,61	82,15	84,83	86,2	86,2
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
1.2		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	67,61	70,61	73,61	73,61
1.3		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.4		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	72,12	76,42	78,31	80,56	80,56
II	MISI II: Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan								
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	72,31	77,26	79,68	81,36	81,36
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap		Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	72,88	78,80	81,66	83,59	83,59
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Persen; Tahunan	74,88	76,93	78,02	79,15	79,15
2.2	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan		Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,20	75,30	75,40	75,50	75,50
2.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,05	55,33	55,48	55,83	55,83
III	MISI III : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan								
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	-1,46	3,5	4,2	4,9	4,9
3.1	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian		Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,18	2,75	2,87	3,23	3,23
3.2	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan		Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	-0,46	1,56	2,74	3,78	3,78
3.3	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata		Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah; Tahunan	1,85	1,99	2,23	2,33	2,33
3.4	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan		Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	-4,20	2,75	3,23	4,56	4,56
IV	MISI IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,39	69,43	70,13	70,83	70,83

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	87,03	87,12	87,21	87,21
4.1		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,546	0,556	0,558	0,560	0,560
4.2		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,794	0,801	0,802	0,804	0,804
4.3		Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,3	70,16	70,8	71,4	71,4
4.4		Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirasaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	100	300	400	500	500
5	Menekan Laju Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,14	8,21	8,11	8,05	8,05
5.1		Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indek Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	1,08	0,98	0,82	0,78	0,78
			Indek Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,19	0,15	0,12	0,10	0,10
5.2		Menekan Laju Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	9,82	9,53	9,24	8,45	8,45
V	Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal								
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	80,00	86,00	88,00	90,00	90,00
6.1		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan	82,66	86,66	88,66	90,66	90,66
7	Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	183,00	174,62	172,12	171,84	171,84
7.1		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,60	0,8	0,89	0,9	0,9
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; tahunan	44,74	55,27	63,16	73,69	73,69
8.1		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Indeks; tahunan	57,50	65,50	70,50	75,50	75,50

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dukuhturi serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Dukuhturi Tahun 2019-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dukuhturi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dukuhturi Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	79,94
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan;	68,00
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan;	0,00
			Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan;	5,56

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 berpedoman pada RKPD dan Renstra Perubahan Kecamatan Dukuhturi Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dukuhturi , maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi :

- a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan :
 - a) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Sub. Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
 - Sub. Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :
 - Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum :
 - a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
 - a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa

- Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Kegiatan Administrasi Umum :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Dukuhturi Tahun 2022, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan disesuaikan dengan jumlah dana / anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berjumlah 6 (enam) program, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.952.924.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Rumusan Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kabupaten Tegal

OPD : KECAMATAN DUKUHTURI

No	Tujuan, Sasaran, Prioritas, urusan Pemda dan Program/Keg/Subkeg	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Lokasi
			Target	Pagu	Sumber Pendanaan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	79,94 %			Kecamatan Dukuhturi
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	50 %			Kecamatan Dukuhturi
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	0 %			Kecamatan Dukuturi
		Peningkatan Persentase desa maju	5,56 %			Kecamatan Dukuhturi
	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK					
	UNSUR KEWILYAHAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	79,94	42.970.000	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	100	31.445.500	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi (Tilik Desa)</i>	<i>1 keg</i>	<i>31.445.000</i>		

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	100	11.514.500	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah desa lunas PBB</i>	<i>18 desa</i>	<i>11.514.500</i>		
		<i>Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur</i>	<i>100 dok</i>			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	100	10.000.000	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanganan Trantibum	18	10.000.000	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah rakor mitigasi bencana (Covid – 19)</i>	<i>1 kali</i>	<i>10.000.000</i>		
		<i>Jumlah LINMAS dibina</i>	<i>40 orang</i>			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	50	53.356.000	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan	18 desa	53.356.000	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub. Kegiatan Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Lomba desa</i>	<i>18 desa</i>	<i>21.984.000</i>		
	<i>Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Monev Bantuan Keuangan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>18 Desa</i>	<i>19.227.000</i>		
	<i>Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Penyusunan RKPDes pada Musrenbangdes</i>	<i>18 Desa</i>	<i>12.145.000</i>		

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhturi	0	107.359.100	DAU	Kecamatan Dukuhturi
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhturi	5.56			
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	18 desa	107.359.100	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD</i>	<i>100 orang</i>	<i>16.992.500</i>		
	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Lomba MTQ</i>	<i>1 kali</i>	<i>90.436.600</i>		
		<i>Jumlah Kegiatan Lomba FASI</i>	<i>1 kali</i>			
		<i>Jumlah Kegiatan Lomba Gamelan</i>	<i>1 kali</i>			
		<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK</i>	<i>12 Kali</i>			
		<i>Jumlah kegiatan Pembinaan Karang Taruna</i>	<i>4 Kali</i>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	100	83.177.300	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	100	83.177.300	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan RI</i>	<i>Jumlah kegiatan Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tegal</i>	<i>2 keg</i>	<i>51.359.800</i>		

	<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan</i>	12 kali	31.817.500		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	100	1.656.060.600	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	6 dok	22.403.500	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	3 dok	6.000.000		
	<i>Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja</i>	3 dok	16.403.500		
		<i>Jumlah Kegiatan Pameran Investasi</i>	1 Kegiatan			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	12 dok	1.242.844.000	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN</i>	1 tahun	1.212.674.000		
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan</i>	12 bulan	30.170.000		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	68.996.500	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>jumlah jenis penerangan bangunan kantor</i>	15 jenis	2.355.400		
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	26 jenis	10.731.700		
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia</i>	15 jenis	3.914.900		

	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>16.291.000</i>		
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</i>	<i>Jumlah jenis barang cetakan</i>	<i>2 jenis</i>	<i>2.669.000</i>		
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan</i>	<i>143 exemplar</i>	<i>3.650.000</i>		
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi</i>	<i>12 bulan</i>	<i>29.384.500</i>		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah		70.800.000	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah meterai</i>	<i>120 buah</i>	<i>1.200.000</i>		
	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air</i>	<i>12 bulan</i>	<i>29.300.000</i>		
	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah tenaga jasa kantor</i>	<i>2 orang</i>	<i>40.300.000</i>		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik		264.000.000	DAU	Kecamatan Dukuhturi
	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara</i>	<i>8 unit</i>	<i>38.150.000</i>		
	<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya terpelihara</i>	<i>40 unit</i>	<i>8.030.000</i>		
	<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Rehabilitasi Tembok Pagar Kecamatan</i>	<i>1 unit</i>	<i>204.837.600</i>		
			TOTAL PAGU	1.952.924.000		

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal dan berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 serta mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Dukuhturi, September 2021
CAMAT DUKUHTURI,

MUKTAROM,S.IP
NIP. 19640919 198607 1 002